

DAFTAR PUSAKA

- Cristi. (2018). *Pajak Penghasilan dan Praktiknya di Indonesia*. Yogyakarta: Mitra Wacana Media.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. Jakarta: Kemenkeu.
- Lumanto, H., Sabijono, A., & Gamaliel, E. (2018). *Administrasi Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)*. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta: Sekretariat Negara.